

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)
TAHUN 2025**



**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI
TELEPON: (0366) 91054**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)
Alamat	Jalan Merdeka Nomor 27 Kawan Bangli
Nomor Telepon	(0366) 91054

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum pulih. PT. BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK, sehingga PT. BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Bangli. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT. BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT. BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA).

PT. BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) telah beroperasi lebih dari 50 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi yaitu terwujudnya pelayanan prima melalui sumber daya manusia yang profesional dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Disepanjang tahun 2025 & untuk tahun mendatang, PT. BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	1. Sangat Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola



dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda). Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	IR I MADE ASTAWA, M.M
	Jabatan	DIREKTUR UTAMA
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR.2. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan SDM, Bagian Operasional dan SPI dan Bagian Teknologi Informasi3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Direksi berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.4. Memastikan dukungan sarana, prasarana termasuk informasi dan Teknologi serta sumber daya manusia untuk kelancaran operasional dalam mencapai sasaran bisnis.5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis, apabila Direktur Bisnis berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas.6. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian keluhan/pengaduan nasabah		
2.	Nama	I WAYAN KARDI, S.E.
	Jabatan	DIREKTUR BISNIS
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab atas pencapaian penghimpunan dana dari masyarakat.2. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.3. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien.4. Menyelenggarakan peghapusbukuan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.5. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai :<ol style="list-style-type: none">a. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya.b. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur inti.c. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit non performingd. Menindaklanjuti temuan- temuan penting dalam perkreditan dan dana yang merupakan laporan hasil pengawasan oleh pengawas intern maupun ekstern.e. Pelaksanaan rencana perkreditan dan penghimpunan dana sebagaimana tertuang		



dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.

f. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis bank.

g. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Pemasaran, Pembinaan dan Pengawasan Debitur dan Bagian Kredit.

h. Menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab Direktur Utama pada saat Direktur Utama berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas.

3.	Nama	I NENGAH PICARAWAN, S.H.
	Jabatan	DIREKTUR KEPATUHAN

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menetapkan langkah* yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain.
4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan atau ketentuan*/SOP intern.
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
6. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
7. Melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
8. Melaporkan secara khusus terkait kebijakan Direksi/ Keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Dir Kep telah menyimpang dari POJK dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya dan laporan ini disampaikan kepada OJK.
9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.
10. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
11. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait manajemen risiko.
12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
13. Mengevaluasi,memberikan opini atau rekomendasi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
14. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
15. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Optimalisasi pemasaran kredit khususnya kredit UMKM dan Kredit Eksekutif,Rapat Team ALCO setiap 1 bulan sekali,sosialisasi aturan internal dan eksternal secara konsisten kepada pegawai,pembuatan SOP sesuai dengan poin a, untuk poin b : sosialisasi akan



dilakukan secara konsisten dan penyampain materi lebih terstruktur, dan poin c: menindaklanjuti temuan BPKP dan pastikan register risiko dipegang oleh seluruh Pejabat Eksekutif, Direktur Utama menindaklanjuti terkait dengan lingkungan dan sosial, Direktur Bisnis terkait pertumbuhan dan Direktur Kepatuhan menindaklanjuti terkait risiko serta mitigasi risiko dan tata kelola, sosialisasi terkait dengan beban kerja pegawai, meningkatkan kualitas monitoring kredit secara berkelanjutan, memperkuat dokumentasi dan kepatuhan terhadap prosedur perkreditan, evaluasi peran maker, checker dan signer, Antisipasi terhadap potensi perubahan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kualitas kredit, mengkaji lebih lanjut terkait efektivitas strategi penyaluran kredit yang berkualitas dan produktif, khususnya pada sektor UMKM sebagai sektor unggulan daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, mengkaji lebih lanjut terkait kualitas aset serta rasio-rasio keuangan agar tetap berada dalam kategori sehat sesuai ketentuan regulator, mengkaji lebih lanjut khususnya terkait KTA, Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kompetensi SDM guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, Mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta kontribusi positif terhadap perekonomian daerah

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	SANG PUTU SUKARASA, S.H.
	Jabatan	KOMISARIS UTAMA

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengawasan BPR
2. Meneliti rencana bisnis (Corporate plan) rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan
3. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR
4. Minta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggung jawab Direksi yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi
6. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Mengkoordinir tugas-tugas Anggota Dewan Komisaris
8. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
9. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi Auditor Eksternal serta pengawasan pihak otoritas
10. Menilai kinerja Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan BPR Syariah dan POJK Nomor 13/ POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
11. Meminta keterangan kepada Direktur Kepatuhan mengenai hal-hal yang



berhubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

12. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh BPR agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
13. Melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan ketersediaan serta kualitas SDM dalam mengoptimalkan operasional dan bisnis BPR

2. Nama	I WAYAN SUAREMBAWA, SE.AK .,M.I.KOM
Jabatan	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Bisnis dalam menjalankan operasional BPR yang meliputi di bidang perkreditan dan penghimpunan dana
2. Meneliti rencana kerja dibidang perkreditan portofolio KAP dan penghimpunan dana pihak ketiga sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk disahkan
3. Mengawasi dan meneliti neraca, laporan laba rugi yang disampaikan oleh Direktur Utama untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah
4. Mengevaluasi kinerja Direktur Bisnis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR khususnya dibidang perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga
5. Mengawasi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis dalam pelaksanaan kebijakan dibidang perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga

Rekomendasi Kepada Direksi:

Memastikan program APU PPT dan PPSPM sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur APU PPT dan PPSPM sesuai dengan POJK 8 Tahun 2023 Tentang APU PPT dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan,Mempercepat proses legalitas dan pengadaan sarana pendukung operasional, seperti pembangunan Gedung Pelayanan Barat, agar rencana ekspansi dan peningkatan layanan dapat terealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Direksi diharapkan meningkatkan pencapaian kredit produktif dengan cara:1) Mengoptimalisasi proses payroll untuk kelancaran pembayaran

- 2) Menyeimbangkan pencapaian kredit produktif 50:50 antara berbagai sektor
- 2) Mengawasi tren NPL Net yang meningkat, dan memperkuat strategi mitigasi risiko kredit.
1. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan internal dan eksternal secara rutin
 - a. Direksi wajib segera menindaklanjuti seluruh temuan audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih outstanding, dengan menyusun rencana aksi lengkap beserta tenggat waktu penyelesaian (time-bound action plan)
 - b. Memperluas cakupan audit internal tidak hanya pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, tata kelola, serta keandalan sistem informasi manajemen.
 - d. Menyusun kebijakan terkait penggunaan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit intern untuk meningkatkan independensi dan kualitas pengawasan
1. Penguatan Manajemen Risiko melalui Meningkatkan efektivitas monitoring kredit, khususnya terhadap potensi peningkatan NPL.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Menyusun perencanaan suksesi (succession planning) yang terstruktur untuk posisi- posisi kunci dan Meningkatkan



kompetensi SDM melalui program pelatihan yang terukur dan berbasis kebutuhan jabatan, termasuk sertifikasi profesional yang relevan.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	IR I MADE ASTAWA, M.M
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I WAYAN KARDI, S.E.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	I NENGAH PICARAWAN, S.H.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	SANG PUTU SUKARASA, S.H.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I WAYAN SUAREMBAWA, SE.AK .,M.I.KOM
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	IR I MADE ASTAWA, M.M
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I WAYAN KARDI, S.E.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	I NENGAH PICARAWAN, S.H.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	SANG PUTU SUKARASA, S.H.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I WAYAN SUAREMBAWA, SE.AK .,M.I.KOM
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	IR I MADE ASTAWA, M.M
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I WAYAN KARDI, S.E.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	I NENGAH PICARAWAN, S.H.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	SANG PUTU SUKARASA, S.H.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I WAYAN SUAREMBAWA, SE.AK .,M.I.KOM
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	IR I MADE ASTAWA, M.M
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I WAYAN KARDI, S.E.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	I NENGAH PICARAWAN, S.H.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	SANG PUTU SUKARASA, S.H.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I WAYAN SUAREMBAWA, SE.AK .,M.I.KOM
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	IR I MADE ASTAWA, M.M
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I WAYAN KARDI, S.E.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Nama	I NENGAH PICARAWAN, S.H.
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	SANG PUTU SUKARASA, S.H.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I WAYAN SUAREMBAWA, SE.AK .,M.I.KOM
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp319.800.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp286.528.347

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
-----------------------------------	---------



Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp647.205.704
---	---------------

Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
-------------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp20.322.383
---	--------------

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	3 orang
---------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp146.599.346
---	---------------

Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
-----------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp48.866.449
---	--------------

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
---	-----

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
--	-----

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
--	---------



Jumlah Nominal Keseluruhan
Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan
(Orang) 3 orang

Jumlah Nominal Perumahan Direksi
(Rp) Rp61.750.000

Jumlah Komisaris Penerima
Perumahan (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Perumahan
Komisaris (Rp) Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima
Transportasi (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Transportasi Direksi
(Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima
Transportasi (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Transportasi
Komisaris (Rp) Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi
Kesehatan (Orang) 3 orang

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan
Direksi (Rp) Rp12.792.000

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi
Kesehatan (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan
Komisaris (Rp) Rp0



2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp7.387.000
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 3,23 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,25 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,25 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,50 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,98 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 07 Januari 2025

Jumlah Peserta 6 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Rapat Dekom dan Direksi Evaluasi RBB Tahun 2024 dan Tindaklanjut Temuan OJK



	Tahun 2024	
2.	Tanggal Rapat	17 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		SK. Dewan Komisaris Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Pembagian Tugas Internal Dewan Komisaris
3.	Tanggal Rapat	22 Juli 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		Rapat Dekom dan Direksi terkait 1. Pemaparan realisasi RBB Semester I Tahun 2025 2. Pembahasan tindak lanjut atas capaian dan kendala pelaksanaan RBB 3. Isu-isu strategis BPR
4.	Tanggal Rapat	01 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2025
5.	Tanggal Rapat	22 Desember 2025
	Jumlah Peserta	6 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		Rapat Dekom dan Direksi terkait 1. Isu-isu strategis BPR 2. Evaluasi Capaian November 2025

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	SANG PUTU SUKARASA,S.H.
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I WAYAN SUAREMBAWA,SE.AK.,M.I.KOM
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir



15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus



Hukum Pada Tahun Laporan

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus



Hukum Pada Tahun Laporan

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	30 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DEWAN PENGURUS PUSAT PERBAMIDA
	Penjelasan Kegiatan	CSR INFRASTRUKTUR SOSIAL/UMUM DALAM RANGKA IKUT SERTA MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BANJIR DI LAMPUNG
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	20 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PURNA PASKIBRAKA INDONESIA (PPI) KABUPATEN BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR DALAM RANGKA KEGIATAN MUSKAB VII PEMILIHAN CALON KETUA PPI KABUPATEN



		BANGLI PERIODE 2025-2030
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	26 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PENGEMPON PURA ULUN SUWI TAMAN SARI
	Penjelasan Kegiatan	CSR PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PURA ULUN SUWI TAMAN SARI
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	25 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA (PERTUNI) KABUPATEN BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR SARANA (UPAKARA) KEAGAMAAN BAGI MASYARAKAT, YANG DILAKSANAKAN SECARA MASSAL DALAM RANGKA DHARMAYATRA DAN GATHERING KE-6 PURA YANG ADA DI BALI DAN JAWA TIMUR
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	14 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT KOTA BANGLI KE-821
	Penjelasan Kegiatan	CSR SENI DAN BUDAYA DALAM RANGKA PEMENTASAN KESENIAN PADA PERAYAAN HUT KOTA BANGLI YANG KE-821
	Jumlah (Rp)	Rp100.000.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	19 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PERBASI KABUPATEN BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR OLAHRAGA DALAM RANGKA PORJAR YANG DILAKSANAKAN DI DENPASAR
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	19 Mei 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SEMETON JEJEG BAGUS KABUPATEN BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR SENI DAN BUDAYA DALAM RANGKA AKAN DISELENGGARAKAN PEMILIHAN JEJEG BAGUS BANGLI 2025
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	22 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR BENCANA ALAM DALAM RANGKA UNTUK Mendukung Kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bangli Tahun 2025
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	23 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	INDONESIA PICKLEBALL FEDERATION (IPF) KABUPATEN BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR OLAHRAGA DALAM RANGKA PERSIAPAN PARTISIPASI EKSEBISI PICKLEBALL KABUPATEN BANGLI DALAM PORSENIJAR DI DENPASAR
	Jumlah (Rp)	Rp1.200.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	19 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	KOMUNITAS BHASWARA BATUR
	Penjelasan Kegiatan	CSR SENI DAN BUDAYA DALAM RANGKA MENGIKUTI PESTA KESENIAN BALI 2025 SEBAGAI DUTA KABUPATEN BANGLI
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	23 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	KOMUNITAS BURUNG TRIDATU BANGLI



	Penjelasan Kegiatan	CSR SENI DAN BUDAYA DALAM RANGKA MENGISI BULAN BAKTI BUNG KARNO PADA BULAN JUNI 2025 DENGAN MENYELENGGARAKAN FESTIVAL LOMBA BURUNG BERKICAU DENGAN TAJUK "BANGLI ERA BARU CUP V"
	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	24 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	02. Kegiatan Politik
	Penerima Dana	SD NEGERI 2 PENINJOAN
	Penjelasan Kegiatan	CSR LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MEMBERIKAN 4 BUAH BUIS BETON DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUBNER YANG DILAKSANAKAN DI SD NEGERI 2 PENINJOAN
	Jumlah (Rp)	Rp1.140.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	29 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DPD KNPI KABUPATEN BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR OLAHRAGA DALAM RANGKA AKAN DILAKSANAKAN KEGIATAN BANGLI FUN RUN OLEH DPD KNPI KABUPATEN BANGLI
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
14.	Tanggal Pelaksanaan	01 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR SENI DAN BUDAYA DALAM RANGKA LOMBA BALEGANJUR HUT RI KE-80 DI KODAM IX UDAYANA
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	16 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DPD PERBARINDO BALI
	Penjelasan Kegiatan	CSR INFRASTRUKTUR SOSIAL/UMUM DALAM



PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id, Email: info@bankdaerahbangli.co.id

		RANGKA AKSI SOSIAL PEDULI BENCANA BALI
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SMP NEGERI 3 BANGLI
	Penjelasan Kegiatan	CSR FASILITAS PENDIDIKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK DIBIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI, KHUSUSNYA ROBOTIKA KARENA AKAN MENGIKUTI AJANG ASEAN ROBOTIC DAY
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
17.	Tanggal Pelaksanaan	17 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PERHIMPUNAN DOKTER TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN BEDAH KEPALA DAN LEHER INDONESIA
	Penjelasan Kegiatan	CSR INFRASTRUKTUR SOSIAL/UMUM DALAM RANGKA BAKTI SOSIAL PERHATI-KL CABANG BALI TAHUN 2025
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bangli, 21 April 2026

PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)


SANG PUTU SUKARASA, S.H.
KOMISARIS UTAMA


H. IMADE ASTAWA
DIREKTUR UTAMA